



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BPHL WILAYAH XIII

MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII merupakan salah satu implementasi dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Rencana Kerja ini menjadi pegangan dalam menjalankan komitmen dan mencapai target kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

Makassar, 29 Desember 2023



Kepala Balai,

Andi Rohaendi, M.Si
NIP. 19720302 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024	7
A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024	7
B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024	29
C. Implementasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2023	32
III RENCANA KERJA TAHUN 2024	37
A. Strategi Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024	37
B. Program, Kegiatan dan Rincina Kegiatan Tahun 2024	47
C. Pengarusutamaan	52
IV PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XIII.....	6
Tabel 2. Matriks Cascading, Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024.....	7
Tabel 3. Matriks Cascading, Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 4. Capaian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2023	10
Tabel 5. Prognosa Capaian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	26
Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2023.....	30
Tabel 7. Prognosa Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	31
Tabel 8. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2023	32
Tabel 9. Program, Sasaran Program dan Indikator Program Ditjen PHL Tahun 2024	42
Tabel 10. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	44
Tabel 11. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	48
Tabel 12. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari.....	6
Gambar 2.	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2023.....	12
Gambar 3.	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023.....	13
Gambar 4.	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
Gambar 5.	Dokumentasi Kegiatan <i>Updating</i> Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang Belum Dibebani Izin	14
Gambar 6.	Dokumentasi Kegiatan Penilaian KPH Efektif.....	15
Gambar 7.	Dokumentasi Kegiatan Penilaian KPH Efektif.....	16
Gambar 8.	Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan PBPH/ Perizinan Lainnya	17
Gambar 9.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi/Desiminasi Perundang-undangan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	18
Gambar 10.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi/Desiminasi Perundang-undangan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	18
Gambar 11.	Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	19
Gambar 12.	Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis KTH	20
Gambar 13.	Dokumentasi Kegiatan Workshop Pengembangan Multiusaha Kehutanan Sosialisasi Penyesuaian PKSO menjadi PBPH/PPPS....	21
Gambar 14.	Dokumentasi Hasil Penanaman dan Pengkayaan pada PT. Sele Raya Agri Kabupaten Muna	22
Gambar 15.	Dokumentasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan PUHH.....	23
Gambar 16.	Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	24
Gambar 17.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SVLK	25
Gambar 18.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SVLK	25
Gambar 19.	Dokumentasi Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan	25
Gambar 20.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan PBPH/Perizinan Lainnya	33
Gambar 21.	Dokumentasi Implementasi PUG berupa Absensi Kegiatan Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	33

Gambar 22.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	33
Gambar 23.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan	35
Gambar 24.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan	35
Gambar 25.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Sosialisasi SVLK	36
Gambar 26.	Dokumentasi Implementasi PUG pada Kegiatan Sosialisasi SVLK	36
Gambar 27.	Skema Prioritas Nasional RKP 2024.....	37
Gambar 28.	Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2024	38
Gambar 29.	Tujuan Pembangunan LHK.....	39
Gambar 30.	Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL	43
Gambar 31.	Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL.....	43
Gambar 32.	Pohon Kinerja BPHL Wilayah XIII T.A 2024.....	47

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kehutanan sebagai perwujudan pembangunan kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan, penguatan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional yang disertai peningkatan partisipasi masyarakat memberikan tantangan yang luarbiasa dalam pencapaian target-target pembangunan sektor kehutanan. Tahun 2024 sebagai tahun terakhir dalam kurun waktu jangka lima tahun pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi kunci akhir dari pencapaian target-target yang harus dicapai. Penyusunan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pegangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yang sistematis, terukur dan adaptif.

Sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diikuti dengan peraturan-peraturan yang merujuk sebagai turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diwujudkan dalam bentuk transformasi kebijakan dan substansi pengelolaan hutan lestari yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi hutan yang ada, meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk menumbuhkan perekonomian.

Ditjen PHL mendorong optimalisasi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terintegrasi melalui mutiusaha kehutanan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Keberlanjutan program-program kerja yang mendukung usaha pengelolaan hutan harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Terobosan terkait kebijakan, pengurusan dokumen perijinan yang cepat dan berasas tanggung jawab, inovasi dan motivasi pengembangan multiusaha kehutanan berbasis masyarakat sangat mendukung proses percepatan pembangunan dan pengelolaan hutan lestari yang lebih baik.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan tertuang dalam lima pilar penting pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengimplementasikan pengelolaan hutan secara lestari yang meliputi : (1) Kepastian Kawasan; (2) Jaminan Berusaha; (3) Produktifitas Hutan; (4) Diversifikasi produk dan (5) Peningkatan Daya Saing. Berdasarkan perubahan tersebut Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari mengakselerasi capaian misi, visi, tujuan dan sasaran program seperti dijabarkan dibawah ini :

MISI

"Terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan"

Berbasis multiusaha kehutanan yang berdaya saing dalam mendukung Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan masyarakat

VISI

Meningkatkan pengelolaan hutan lestari serta daya saing usaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan serta produk hasil hutan dalam mewujudkan manfaat hutan dan lingkungan hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

TUJUAN

Meningkatkan investasi usaha kehutanan dan pengolahan hasil hutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan

SASARAN PROGRAM

- Meningkatnya produktivitas kawasan hutan
 - Meningkatnya produksi kayu bulat
- Meningkatnya nilai ekspor produksi hasil hutan
- Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan
- Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat

Ditjen PHL telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghasilkan analisis strategis dalam bentuk matriks *SWOT* sehingga dapat membantu pengambilan langkah-langkah strategis pengelolaan hutan lestari.

STRENGTH (Kekuatan)

1. Luas kawasan hutan produksi 68,83 juta hektar dan hutan lindung 29,66 juta hektar
2. Potensi sumberdaya hutan produksidan hutan lindung, meliputi: hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi.
3. Kewenangan Ditjen PHL dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan secara lestari.
4. Sudah terbentuknya 347 KPHP dan 197 KPHL sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak.
5. Capaian pembangunan hutan produksi periode 2015-2019 yang menjadi titik-tolak untuk pemenuhan kinerja pada periode tahun 2020-2024

WEAKNESS (Kelemahan)

1. KPH sebagai pengelola di tingkat tapak belum semua memiliki kelembagaan (belum mantap), sarana prasarana dan pendanaan sehingga masih terdapat kawasan hutan yang open access.
2. Masih adanya kasus pelanggaran (perdata, pidana dan administartif) berkenaan dengan pengelolaan hutan lestari.
3. Pengelolaan hutan lestari belum terwujud secara holistik (perencanaan, pemanenan, pembinaan, perlindungan dan pengamanan) pada tingkat tapak, karena praktik pengelolaan hutan tidak dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
4. Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun Unit Manajemen dengan Rencana

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. SDM Ditjen PHL yang kompeten, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi serta didukung dengan peralatan yang memadai. 7. SI-PHL telah mampu mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi pada Ditjen PHL serta mampu memberikan informasi lacak balak hasil hutan dan penerimaan PNPB. 8. SVLK sebagai jaminan legalitas produk kayu dan menjadi benchmar | <p>Pengelolaan Hutan pada KPH dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum menjadi pengarusutamaan (mainstream) dalam pengembangan/diversifikasi industri kehutanan. 6. Regulasi yang ada kurang fleksibel terhadap kendala/ permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di lapangan. 7. Daya saing produk kehutanan masih rendah dan masih terjadi ekonomi biaya tinggi |
|---|--|

*O*PPORTUNITIES (Peluang)

*T*HREAT (Tantangan)

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi. 2. Permintaan atas bahan baku hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun. 3. Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target NDC akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan. 4. Implementasi teknik silvikultur intensif, penerapan pemanenan berdampak rendah dan intensifikasi pengelolaan hutan akan mampu meningkatkan produktivitas hutan. 5. Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi. 6. Implementasi SVLK mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk industri kehutanan Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Walaupun tren deforestasi terus menurun, tetapi tetap memberikan dampak semakin berkurangnya kawasan hutan produksi. 2. KARHUTLA masih menjadi pemicu terjadinya deforestasi, degradasi dan penurunan produktivitas kawasan hutan produksi serta berdampak pada terganggunya perekonomian. 3. Konflik tenurial yang berlarut-larut berpengaruh terhadap ketidakpastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 4. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi. 5. Dengan luas kawasan hutan sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia, kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6 % menyebabkan sektor kehutanan selalu dipandang sebelah mata dalam pembangunan nasional |
|--|---|

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai wilayah kerja pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII diwujudkan dalam program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas pokok melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas Kepala Balai dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kepala Balai memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - b. Memimpin pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;

- c. Memimpin pemantauan dan evaluasi dibidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 - d. Memberikan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
 - e. Memberikan penugasan dalam urusan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi.
- 2. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
 - 3. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
 - 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII

Sumberdaya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berjumlah 64 (enam puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 (sebelas) orang PPNP, seperti dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XIII

NO	PNS										PPPK				TENAGA PPNPN						JUMLAH		TOTAL
	S3		S2		S1		D III		SLTA		S1		SLTA		S1		D III		SLTA				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
KEPALA BALAI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FUNGSIONAL KHUSUS	1	-	5	-	7	6	1	2	1	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	17	13	30
SUBBAGIAN TATA USAHA	-	-	1	2	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	6	-	17	5	22
SEKSI PPPPHL	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
SEKSI PEPHPL	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
JUMLAH	1		12	3	19	8	1	2	1	1	1	4	2	-	2	1	-	-	6	-	45	19	64

Sumber : SIMPEG BPHL-XIII, 2023

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Tahun 2023 melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Balai Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan kegiatan ini didasarkan atas pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditentukan selama kurun waktu 2020 - 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. T1.S4.1.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
		2. T2.S2.1.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	2. T2.S2.1.1.1 Jumlah Produksi Kayu Bulat
		3. T2.S3.1.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	3. T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
		4. T2.S4.1.1.1 Meningkatnya PNBPN dari Pemanfaatan Hutan	4. T2.S4.1.1.1 Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Hutan
		5. T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	5. T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
2	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Tabel 3. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	T1. S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)
			T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH) 2. T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH) 3. T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)
2	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1. T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH) 2. T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH) 3. T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH) 2. T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)
3	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	1. T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)
			T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	1. T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH) 2. T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)
4	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1. T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH) 2. T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	1. T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)
6	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	1. T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 2. T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 3. T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Tabel 4. Capaian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Nilai SAKIP	82 Poin	(Target PHL)
		T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Level Maturitas	Level 4	Level 4
		T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas oengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga	1 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Realisasi
	Nilai SAKIP Ditjen PHL Level Maturitas SPIP Ditjen PHL Laporan keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel	T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha
		T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Kinerja multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
5	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat
6	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Pemantauan dan evaluasi bidang iuran dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha
		T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Realisasi
7	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha
			Perizinan pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha
8	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan pembinaan UMKM kehutanan oleh BPHL	1 UMKM	2 UMKM

Hasil pengukuran dan analisa pencapaian kinerja untuk setiap Rincian Output Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

RO-1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 82 Poin, penilaian mandiri SAKIP pun dilakukan pada BPHL Wilayah XIII dengan nilai 75.90 poin. Penilaian mandiri SAKIP pada BPHL Wilayah XIII berupa Rapat Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Lestari, dan bimbingan teknis implementasi SAKIP dan rapat pengelolaan kinerja Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.58.193.430,-.

RO-2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mencapai pada level 4 yaitu penilaian mandiri maturitas terkelola dan terukur, pada BPHL Wilayah XIII hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tahun 2023 yaitu mencapai level 4 terkelola dan terukur.

Adapun kegiatan yang menunjang level maturitas SPIP berupa mengikuti pendampingan penyusunan rencana pengendalian intern Tahun 2024, dan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tingkat Satuan Kerja (Satker) dengan nilai sebesar Rp. 14.454.709,-.

RO-3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel



Untuk menunjang laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel, BPHL Wilayah XIII melalui layanan dukungan manajemen satker, melaksanakan penyediaan data, informasi dan keuangan berupa Konsolidasi dan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data pada sistem SAKTI dalam penyusunan Laporan Keuangan

Tahunan Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023, Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data SI-AKLAP, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan melalui Bimtek Aplikasi SAKTI, Pengurusan lelang BMN berupa barang inventaris kantor, Bimbingan Teknis Aplikasi Digipay Satu, pembahasan kelengkapan administrasi dan teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan pengadaan di kantor BPHL wilayah XIII, penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2025 dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dengan nilai sebesar Rp.98.938.570,-.

RO-4 Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif



Kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif dilakukan dengan cara melaksanakan bimbingan teknis penyusunan RPHJP/RPHJPD yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH. Kegiatan bimbingan teknis penyusunan RPHJP/RPHJPD dilaksanakan di Hotel Claro Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengundang

perwakilan yang berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Materi yang disampaikan berupa Penyusunan RPHJP/RPHJPD berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 8 Tahun 2021 serta *coaching clinic* penginputan data pada aplikasi website pada SI-RPHJP.

Pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII terdapat 62 KPH, yang tersebar pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 16 KPH yang telah melakukan pengesahan RPHJP dan penyusunan RPHJP sudah sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, dan 8 KPH sementara dalam proses pengesahan RPHJP, wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 KPH yang telah memiliki RPHJP dan 1 KPH dalam proses penyusunan RPHJP, dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 18 KPH yang telah melakukan pengesahan RPHJP sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan 7 KPH yang masih dalam proses pengesahan RPHJP.

Selain bimbingan teknis penyusunan RPHJP/RPHJPD, Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif di BPHL Wilayah XIII dilaksanakan dalam kegiatan *Updating* peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani izin. Pelaksanaan *Updating* peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani izin dilaksanakan dengan metode mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pemanfaatan/penggunaan hutan eksisting, Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) serta potensi kawasan hutan sebagai bahan penyusunan usulan Arahan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH di beberapa wilayah kerja BPHL Wilayah XIII yaitu Wilayah

KPH Bila Kabupaten Sidrap, KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, KPH Saddang I Kabupaten Tana Toraja, KPH Saddang II Kabupaten Toraja Utara, KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, KPH Sawitto Kabupaten Pinrang, KPH Walanae Kabupaten Soppeng, KPH Mapili Kabupaten Polman, dan KPH Malunda Kabupaten Majene.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2023, dengan adanya perubahan tersebut Rencana Strategi Tahun 2020-2024 pada Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari mengalami revisi, sehingga Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XIII melakukan revisi pada rencana strategi Tahun 2020-2024. Sebelum terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Indikator kinerja pada tahun 2020 sampai dengan 2022 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan terfokus pada Jumlah KPH yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat dengan Rincian Output adalah Perencanaan Pengelolaan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan. Untuk Tahun 2023, Indikator Kinerja berupa Luas Pemanfaatan hutan Berbasis Masyarakat dengan Rincian Output yaitu Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif. Berdasarkan data dan uraian diatas, realisasi anggaran Tahun 2023 untuk Kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif sebesar Rp.275.258.774,- atau sebesar 100% dari total pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.275.263.000. Realisasi capaian output untuk RO 4 sebesar 1 Lembaga atau 100% dari target capaian output 1 Lembaga.

RO 5. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

1). Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari



Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi KPH Efektif. Kegiatan penilaian KPH efektif dapat berjalan dengan baik melalui dukungan instansi Pembina Lembaga Pemerintahan Daerah, stakeholder terkait serta bersinergi dengan KPH sebagai organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan sebuah keniscayaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan yang mendukung masyarakat



mandiri dan hutan lestari. Saat ini jumlah unit KPH pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII sebanyak 61 KPH, 26 KPHP dan 35 KPHL. Standar penilaian kinerja KPHP dan KPHL saat itu masih dibedakan berdasarkan unit eselon I yang mengampu pada masing-masing KPH tersebut. Saat ini sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, kewenangan pembinaan KPH baik KPHP maupun KPHL difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Penilaian kinerja KPH saat ini berdasarkan Revisi Renstra KLHK 2020-2024, nomenklatur KPH Maju telah bertransformasi menjadi KPH Efektif (organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri hutan lestari). Standar penilaian KPH Efektif telah dibangun dengan mengakomodir beragam kepentingan melalui Konsultasi Publik, yang berdasarkan pada pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang dilakukan oleh KPH. Melalui penilaian kinerja KPH efektif ini diharapkan dapat mewujudkan KPH yang efektif yang dirasakan (*outcome*) oleh masyarakat antara lain dalam bentuk jumlah kelompok ekonomi produktif masyarakat yang terbentuk, peningkatan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan akses pasar yang berkelanjutan dalam rangka masyarakat mandiri, serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari berupa penurunan jumlah konflik tenurial, pengamanan kawasan hutan dari gangguan hutan, dan terpeliharanya tutupan hutan.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), untuk mendukung *outcome* dari pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPH dan capaian IKK tersebut, maka berdasarkan Keputusan Direktur BRPH PHL Nomor : SK. 14/BRPH/PKPH/HPL.0/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian KPH Efektif dalam mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pada Tahun 2023 penilaian KPH efektif pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XIII di fokuskan pada KPH yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kemudian masing masing KPH yang telah ditunjuk melakukan penilaian mandiri (*Self Assesment*) untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim gabungan dari Direktorat BRPH, BPHL Wilayah XIII dan Dinas Kehutanan Provinsi. Penilaian KPH efektif yang telah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan yaitu KPH Mamasa Timur di Kabupaten Mamasa Timur Provinsi Sulawesi Barat, KPH Walanae di Kabupaten Soppeng, KPH Bulusaraung di Kabupaten Maros, dan KPH Sawitto di kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini sedang menunggu hasil penilaian dan penetapan sebagai KPH Efektif oleh Direktur BRPH.

2) Fasilitas dan pembinaan PBPH/Perizinan lainnya dalam Wilayah KPH



Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dengan tugas pokok dan fungsi salah satunya melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan PBPH/Perizinan Lainnya yang berada dalam wilayah kerja kerja BPHL Wilayah XIII.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan teknis terkait legalitas perizinan pemanfaatan hutan dan rencana kerja pada PBPH/Perizinan lainnya. Pada tahun 2023, BPHL Wilayah XIII telah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan PBPH pada PT.Inhutani I Tana Toraja dan CV Maido pada wilayah KPH Saddang I Kabupaten Tana Toraja, Koperasi Serba Usaha Jaya Abadi pada wilayah KPH Ulubila Kabupaten Bone dan Koperasi Produsen Harapan Lajoangin Makmur pada wilayah KPH Cenrana Kabupaten Bone.

3) Sosialisasi/Desiminasi Perundang-undangan terkait perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Dalam Rangka Mendukung KPH Efektif Tahun 2023, BPHL Wilayah XIII bekerja sama dengan BPHL Wilayah XII melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023,

bertempat di The Rinra Hotel, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 131 orang peserta yang berasal dari KPH, Unit Manajemen pemegang PBPH yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XII dan BPHL Wilayah XIII dan personil BPHL Wilayah XII dan BPHL Wilayah XIII. Dengan komposisi peserta terdiri dari 94 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.



Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas LHK Sulawesi Selatan, yang selanjutnya penyampaian arahan Dirjen PHL yang disampaikan oleh Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc. selaku Sekditjen PHL.

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Permen LHK No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc. selaku Sekditjen PHL mewakili Dirjen PHL;
- Mekanisme Perdagangan Karbon oleh PBPH Berbasis Multiusaha Kehutanan Melalui Kegiatan Aksi Mitigasi Indonesia dan FOLU Net Sink 2030, yang disampaikan oleh Ir. Khairi Wenda, M. Si selaku Direktur PUPH; dan
- Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang disampaikan oleh Dr. Syaiful Anwar dari Ditjen PPI.

Berdasarkan data dan uraian diatas, kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari mencapai realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 230.777.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.230.724.930,- realisasi capaian output untuk RO 5 yaitu 1 Lembaga atau 100% dari target capaian output 1 Lembaga.

RO 6. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan



Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang usaha pemanfaatan hasil hutan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta bertujuan terciptanya efektifitas pemanfaatan hasil hutan dan terpenuhinya

hak-hak negara atas hasil hutan yang dimanfaatkan serta tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan hasil hutan. BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan pada Perizinan Berusaha PT. Sampewali di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan KTH Alam Lestari Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan bertujuan mendorong pemegang usaha menyusun RKUPH/RKTPH sebelum melakukan aktifitas pemanfaatan hutan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari mencapai realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp.175.597.156,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.175.598.000,- dengan realisasi capaian output untuk RO 6 yaitu 2 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 2 Badan usaha.

RO 7. Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan berbasis kelompok tani hutan mendorong kelompok tani untuk meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan terutama perencanaan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada kelompok masyarakat guna memfasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan hutan dalam Legalitas Persetujuan Perhutanan Sosial,



Rencana Kerja Usaha (RKU)/Rencana Kerja Pengelolaan Sosial (RKPS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sistem Informasi Hasil Hutan (SIPUHH), Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH). Pada tahun ini BPHL Wilayah XIII fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan dilaksanakan di PPHKm Gapoktanhut Samaturu di Kabupaten

Konawe selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan LPHD Batu Alu di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan berbasis kelompok tani hutan dilaksanakan pada 2 kelompok tani tersebut karena merupakan Kelompok Tani Yang Memanfaatkan HHBK (Getah Pinus/ Rotan), dimana Getah Pinus dan Rotan termasuk Salah satu penghasil PNPB untuk Wilayah Kerja BPHL XIII serta LPHD Batualu sudah melakukan Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai aturan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan data dan uraian diatas, kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan berbasis kelompok tani hutan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.94.998.558,- atau 100% dari pagu anggaran Rp.95.000.000,- realisasi capaian output untuk RO 7 sebesar 2 Kelompok Masyarakat atau 100% dari target capaian output 2 Kelompok Masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan berbasis kelompok tani hutan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan ditahun 2023 seiring dengan adanya revisi Renstra 2021-2024 BPHL Wilayah XIII. Kegiatan untuk RO 7 ini sesuai dengan sasaran kegiatan luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dalam volume luasan Hektar.

RO 8. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan meliputi pelaksanaan kegiatan Workshop Pengembangan Multiusaha Kehutanan dan sosialisasi penyesuaian Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) dalam mendukung optimalisasi PNPB dengan tujuan agar para pelaku usaha baik laki- laki maupun perempuan dapat melakukan percepatan penyesuaian PKSO menjadi PBPH



atau PPPS untuk mewujudkan pemanfaatan hutan lestari dan peningkatan PNBPN sektor kehutanan. Kegiatan workshop dilaksanakan di Hotel Fourpoint by Sheraton Makassar Tanggal 24 Oktober 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 30 Orang. Acara workshop tersebut di buka

oleh Kepala Bidang Perencanaan Hutan mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Materi dibawakan narasumber dari Balai PSKL dengan materi penyesuaian PKSO melalui mekanisme PS, Narasumber dari Direktorat BUPH dengan materi penyesuaian PKSO melalui mekanisme PBPH, Narasumber dari Direktorat PUPH dengan materi pengembangan multibusaha kehutanan.

Tahun 2023 BPHL Wilayah XIII memfokuskan pengembangan multibusaha pada perizinan berusaha PT. Kencana Hijau Bina Lestari di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi selatan. PT. Kencana Hijau Bina Lestari memiliki PKSO dengan KPH Saddang I terkait pemanfaatan penyadapan getah pinus dan sesuai Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5 Tahun 2023 dimana semua pelaku PKSO melakukan permohonan Penyesuaian menjadi PBPH/PPPS. Untuk itu BPHL Wilayah XIII mendorong agar PT. Kencana Hijau Bina Lestari segera melakukan Permohonan Penyesuaian PKSO menjadi PBPH.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multibusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan mencapai realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.354.536.643,- atau 100% dari pagu anggaran Rp.354.567.000,- . Realisasi capaian output untuk RO 8 sebesar 1 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 1 Badan Usaha.

RO 9. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan



Kinerja multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktifitas pengelolaan hutan dan pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan oleh perizinan berusaha dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang rencana dan realisasi kegiatan pemanfaatan hutan, terutama pada pengendalian penanaman/produksi hasil hutan. Tahun 2023 BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan kinerja multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan

dikendalikan terhadap penanaman dan pengkayaan kawasan hutan pada perizinan berusaha PT.Inhutani I di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Sele Raya Agri Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, Kegiatan Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan mencapai realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.514.245.637,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.514.255.000,- dengan realisasi capaian output untuk RO 9 sebesar 2 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 2 Badan Usaha.

RO 10. Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan bertujuan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan yang diprioritaskan pada unit manajemen yang memiliki tunggakan pembayaran iuran kehutanan dan/atau piutang negara.

Tahun 2023, BPHL Wilayah XIII memprioritaskan pemantauan dan evaluasi pada unit manajemen yang memiliki tunggakan yaitu PT. Katingan Timber Celebes dan untuk unit manajemen yang tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan yaitu KTH Sipatuo dan Gapoktanhut Tomaupa.



Berdasarkan hal tersebut, Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mencapai realisasi anggaran pada Tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.122.823.285,- atau 99.80% dari pagu anggaran Rp.123.065.000,-. Dan untuk realisasi capaian output untuk RO 10 sebesar 3 Badan

Usaha atau 100% dari target capaian output 3 Badan Usaha.

RO 11. Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil hutan

Pengawasan dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan, kegiatan ini untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan oleh pemegang PBPH/iuran kehutanan dan harga pasar produk hasil hutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan terciptanya efektifitas dan efisisensi pemanfaatan hasil hutan serta tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan/iuran kehutanan oleh pemegang PBPH dan harga pasar produk hasil hutan.

Tahun 2023 BPHL Wilayah XIII melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan di KTH Osupinole Kabupaten Konawe dan KTH Padawulo Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara dan KTH Garassi Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkaity hal diatas, Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan mencapai realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.232.180.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.232.180.000,- dengan realisasi capaian output untuk RO 11 sebesar 3 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 3 Badan Usaha.

RO 12. Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan



Fasilitas dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendampingi dan melakukan pembinaan teknis legalitas pengolahan hasil hutan terhadap pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah dalam rangka

pelaksanaan sertifikasi legalitas hasil hutan, adapun tujuannya agar tercipta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi legalitas hasil hutan pada pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah. Tahun ini BPHL wilayah XIII melaksanakan kegiatan fasilitas dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan pada UD. Sumber Jati Perkasa, UD Sinar Permadani, CV. Inri, CV. Fajar Indah, UD Awal Harapan Baru, UD. Kasman Indah, UD Nur Ilahi, UD Riska Indah, UD Agung Arung, UD Izhar.

Terkait hal tersebut diatas, Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan mencapai realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.317.064.000,- atau 100% dari pagu anggaran Rp.317.063.183,- dengan realisasi capaian output untuk RO 12 sebesar 10 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 10 Badan Usaha.

RO 13. Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan, berupa kegiatan monitoring ketaatan dan kepatuhan pemegang izin industri terhadap peraturan-peraturan yang terkait dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan peredaran hasil hutan, salah satunya kepemilikan S-LK. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peredaran hasil hutan.

Pelaksanaan fasilitasi penilaian SVLK bagi UMKM Kehutanan pada Kelompok Kabupaten Konawe Selatan (CV. Nur Anisa, UD Fajar Adit, dan CV Karya Tiga Bersaudara) dan Kelompok Kabupaten Bau-Bau, Muna, Muna Barat (PBPHH UD. Wahyu Meubel). Fasilitasi penilaian SVLK ini untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip, kriteria, indikator dan verifier verifikasi legalitas hasil hutan selama masa berlaku sertifikat legalitas hasil hutan.



Selain kegiatan fasilitasi Penilaian SVLK bagi UMKM Kehutanan, dilaksanakan juga Sosialisasi Peraturan SVLK pada 5 (lima) lokasi yaitu di Kabupaten Bone, Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Gowa dan Kota Mamuju.

Berdasarkan data dan uraian diatas, Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kehutanan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.780.549.243,- atau 100% dari pagu anggaran Rp.780.552.000,- dengan realisasi capaian output untuk RO 13 sebesar 2 UMKM atau 200% dari target capaian output 1 UMKM.

RO 14. Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya



Perizinan Pengolahan Hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya, berupa pemantauan kinerja perizinan berusaha pengolahan hasil hutan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan RKOPHH dan realisasinya serta efisiensi bahan baku, dan dan informasi SVLK, data dan informasi pelaksanaan PUHH, data dan informasi pemasaran, data dan informasi harga

kayu bulat dan olahan, serta data dan informasi nilai investasi dan serapan tenaga kerja. Tahun 2023, BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Perizinan Pengolahan Hasil hutan

yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya pada UD. Semoga Bahagia – Kab.Luwu Timur, UD. Neka Indah – Kab. Luwu Timur, UD. Verbeck Utama – Kab. Luwu Timur, UD. Mandiri Jaya – Kab.Mamuju, UD. Miftahul Jannah – Kab. Luwu Timur, UD. Usaha Murni – Kab. Luwu Timur, UD. Kios Cahaya Putemata – Kab. Kolaka Timur, CV. Nur Annisa – Kab. Konawe Selatan, UD. Fajar Adit – Kab. Konawe Selatan, CV. Karya Tiga Bersaudara – Kab. Konawe Selatan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, Perizinan Pengolahan Hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya mencapai realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp.378.430.780,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.378.431.000,- dengan realisasi capaian output untuk RO 14 sebesar 10 Badan Usaha atau 100% dari target capaian output 10 Badan Usaha.

Prognosis Tahun 2024

Pencapaian kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2023 terlaksana dengan baik walaupun mengalami beberapa kondisi terkait adanya *Automatic Adjustment (AA)* Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2023 dalam rangka pemenuhan kebutuhan akibat kondisi geopolitik global. Perubahan tersebut dilaksanakan dan tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan target komitmen selama Tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 akan tetap mempertahankan kinerja Balai dengan baik serta memperhitungkan target output perjanjian kinerja dalam mendukung pelaksanaan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Tabel 5. Prognosa Capaian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Prognosa
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Perkantoran	83 Poin	83 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL	Layanan Umum	98,29 Poin	98,29 Poin
		T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Prasarana Internal	Level 4	Level 4
		T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Layanan Sarana Internal	1 Laporan	1 Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Prognosa
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas oengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	2 Lembaga	2 Lembaga
		T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	2 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha
		T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Badan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha
5	Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Fasilitasi implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Prognosa
7	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Layanan iuran dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha
		T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Pengawasan dan pengendalian PNPB pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha
9	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha
			Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha
10	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM	3 UMKM

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2023 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menerapkan pencadangan/blokir/*Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga, dan mengalami perubahan (pengurangan dan penambahan) Pagu. Tahap AA dan perubahan Pagu Anggaran yaitu sebagai berikut :

- Blokir/*Automatic Adjustment* (AA) pertama dilaksanakan pada Bulan Januari 2023 yaitu blokir sebesar Rp. 300.000.000,- yang berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai (Belanja Barang). Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 Hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2023. Sesuai arahan presiden bahwa blokir AA ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
- Tahap kedua yaitu penyesuaian belanja pegawai. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 701/MENLHK.SETJEN/ ROCAN/ REN.0/7/2023 Tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Rencana Relaksasi Belanja Kementerian LHK T.A 2023. Berdasarkan hal tersebut BPHL Wilayah XIII merealokasi anggaran yang terblokir dan direvisi ke Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga pagu mengalami pengurangan dari Rp. 11.633.170.000,- menjadi Rp. 11.533.170.000,-.
- Tahap ketiga berupa penyelesaian penyesuaian Belanja Non Pegawai yang telah di Blokir pada Bulan Januari 2023. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S. 841/SET.5/PEHKT/REN.1/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* (AA) Belanja K/L T.A 2023, BPHL Wilayah XIII merealokasi anggaran yang telah terblokir dan direvisi ke Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 200.000.000,-. Hal tersebut mengakibatkan pengurangan Pagu Anggaran yang berasal dari kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Area yang Belum Dibebani Ijin sehingga pagu semula mengalami pengurangan dari Rp. 11.533.170.000,- menjadi Rp. 11.333.170.000,-

- Tahap terakhir yaitu optimalisasi belanja pegawai. Berdasarkan S. 865/SET.5/PEHKT/REN.0/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2024 Hal Optimalisasi Belanja Pegawai dalam Pemenuhan Pembayaran Gaji PPPK lingkup Ditjen PHL T.A 2023, BPHL Wilayah XIII memperoleh tambahan anggaran untuk Belanja Pegawai (penambahan pagu gaji pokok dan tunjangan kinerja bagi pegawai dan PPPK) sebanyak Rp. 380.420.000,- sehingga pagu dari Rp. 11.333.170.000,- menjadi Rp. 11.713.590.000,-

Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 BPHL Wilayah XIII mencapai 99,99 % dengan rincian serapan per Rincian Output dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2023

Kode	Kegiatan / Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%
Program Dukungan Manajemen				
5396.EBA.				
5396.EBA.962	Layanan Umum	180.000.000	179.999.700	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	8.058.838.000	8.056.807.706	100
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan			
6729 BIC	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	275.263.000	275.258.774	100
6729 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	230.777.000	230.724.930	99.98
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan			
6730 BIH	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	175.598.000	175.597.156	100
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan			
6731 BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	95.000.000	94.998.558	100
6731 BDH	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	354.567.000	354.536.643	99.99

6731 QIH	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	514.255.000	514.245.637	100
6732	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
6732 BDH	Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	123.065.000	122.823.285	100
6732 BIH	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	232.180.000	232.180.000	100
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan			
6733 BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	317.064.000	317.063.183	100
6733 QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	780.552.000	780.549.243	100
6733 QIH	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	378.431.000	378.430.780	100
	TOTAL	11.713.590.000	11.713.215.595	99.99

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2023 BPHL Wilayah XIII.

BPHL Wilayah XIII tetap akan berkomitmen penuh dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional pemerintah dan mengoptimalkan pencapaian target pada Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan. Prognosis serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Prognosis (%)
029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	1.213.331.000	100
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	531.555.000	100
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.094.645.000	100
6732	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	443.198.000	
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1.628.466.000	100

029.03.WA Program Dukungan Manajemen			
5396	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	11.237.361.000	100

Tabel 7. Prognosa Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

C. IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023

Sebagai sebuah strategi pembangunan, Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat memberikan ruang keadilan dan kesetaraan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan partisipasi, membuka akses yang luas dan terbuka serta mengambil manfaat dari perkembangan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dalam memperoleh akses, kontrol, sumber daya dan manfaat dari pembangunan. BPHL Wilayah XIII pada Tahun 2023 melaksanakan kegiatan responsif gender pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Implementasi Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2023

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	Pagu (Rp.)
6729.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	230.777.000
6731.QIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001. Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	514.255.000
6733.QDG. Fasilitas dan Pembinaan UMKM	001. UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat	1 UMKM	780.552.000

Kegiatan responsif gender Tahun 2023 pada BPHL Wilayah XIII antara lain :

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.052) merupakan kegiatan yang ditagging Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran sebesar Rp. 230.777.000,- (*Dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan yang mendukung PUG pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari yaitu Kegiatan Verifikasi KPH Efektif dan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan

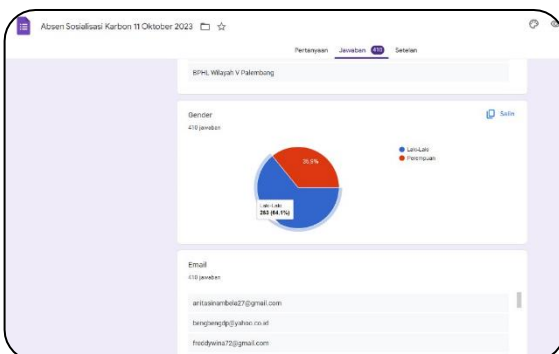


PBPH/perizinan lainnya dalam wilayah KPH. BPHL Wilayah XIII telah melaksanakan dan menjamin perolehan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam kegiatan tersebut, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, pengambilan keputusan sampai evaluasi kegiatan. Hal ini memastikan bahwa

seluruh kegiatan telah memberikan dampak yang sama baik laki-laki dan perempuan yang ada di internal BPHL Wilayah XIII dan pihak-pihak eksternal yang memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Tahun 2023, BPHL Wilayah XIII bekerjasama dengan BPHL Wilayah XII melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan yang dilaksanakan secara luring pada Bulan Oktober 2023, bertempat di The Rinra Hotel, Kota Makassar dan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan ini diikuti secara luring oleh 131 orang yang terdiri dari 94 orang laki-laki dan 37 orang perempuan dan peserta daring terdiri dari 410 peserta yang terdiri dari 283 laki-laki dan 127 perempuan

yang berasal dari KPH, Unit Manajemen



pemegang PBPH yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XII dan BPHL Wilayah XIII dan staf Ditjen PHL.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas LHK Sulawesi Selatan, yang selanjutnya penyampaian arahan Dirjen PHL yang disampaikan oleh Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc. Selaku Sekditjen PHL. Adapun materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Permen LHK No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc. Selaku Sekditjen PHL mewakili Dirjen PHL;
- Mekanisme Perdagangan Karbon oleh PBPH Berbasis Multiusaha Kehutanan Melalui Kegiatan Aksi Mitigasi Indonesia dan Folu Net Sink 2030, yang disampaikan oleh Ir. Khairi Wenda, M. Si selaku Direktur PUPH; dan
- Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang disampaikan oleh Dr. Syaiful Anwar dari Ditjen PPI

Kegiatan ini membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak baik laki-laki dan perempuan untuk ikut berpartisipasi, menggali informasi dan ilmu, mengambil manfaat dan memotivasi diri untuk ikut serta secara aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Keterlibatan multi pihak baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat maupun seluruh aktor kehutanan laki-laki dan perempuan untuk berkolaborasi, saling mendukung dan berkomitmen dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional maupun global.

Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Kinerja multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (6731.QIH.001) merupakan kegiatan yang ditagging Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran sebesar Rp. 514.255.000,- (*Lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Implementasi PUG pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan pada BPHL Wilayah XIII dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, penentuan sasaran dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Kegiatan penanaman dan perlindungan hutan sangat erat kaitannya dengan issue gender,

dimana semua aspek pemanfaatan dan pengelolaan hutan akan terkait langsung dengan aktifitas manusia baik laki-laki dan perempuan. Implementasi PUG diharapkan memperkuat kemampuan multiusaha kehutanan dalam memberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan sehingga keduanya dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang adil dan bertanggungjawab.



Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001) merupakan kegiatan yang ditagging Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran sebesar Rp. 780.552.000,- (*Tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*). Implementasi PUG pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder yang memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Penerapan SVLK sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari dan sebagai upaya membasmi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Untuk itu BPHL Wilayah XIII melaksanakan Sosialisasi terkait SVLK, dengan tujuan untuk memberikan sarana pengembangan pengetahuan baru, kepercayaan diri, jaringan kerja dan pengembangan usaha untuk para pelaku UMKM kehutanan baik laki-laki maupun perempuan. Sosialisasi terkait peraturan SVLK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, representasi dan keinginan untuk mengembangkan diri baik laki-laki dan perempuan untuk terus menjaga kualitas dan nilai produk-produk hasil hutan yang dihasilkan.

Terkait hal tersebut pada Tahun 2023, BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan SVLK dengan maksud untuk meningkatkan wawasan masyarakat sekitar hutan dan pelaku usaha/unit manajemen yang bergerak disektor kehutanan. Melalui Sosialisasi SVLK ini, diharapkan agar kegiatan pengusahaan hutan kedepannya

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



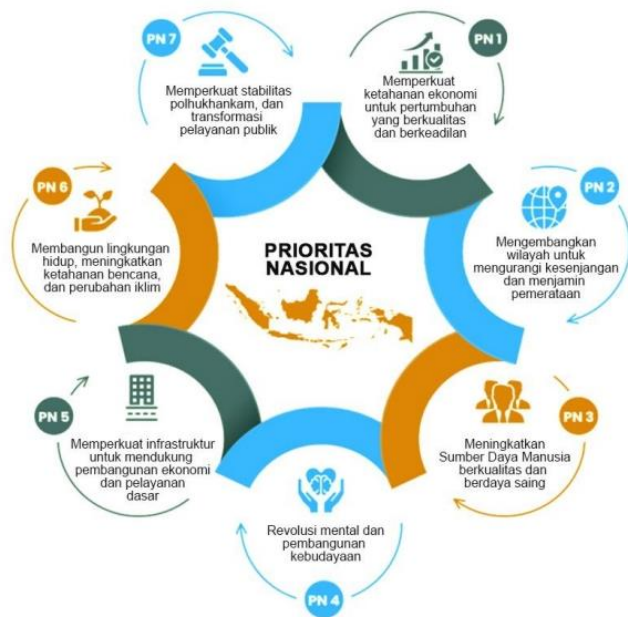
Kegiatan Sosialisasi SVLK selama Tahun 2023 dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan

Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah peserta yang mewakili keterlibatan laki-laki dan perempuan secara representatif. Kegiatan ini memberi gambaran yang jelas tentang pentingnya SVLK bagi pelaku usaha kehutanan, baik unit usaha skala besar, menengah dan kecil. SVLK memastikan produk dari usaha bidang kehutanan bisa diterima dan bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi dapat bersaing di pasar internasional. Pengetahuan dan keinginan para pelaku usaha untuk mengimplementasikan SVLK ini di unit usaha mereka sangat penting untuk mewujudkan *Good Forest Governance* yang dimulai dari unit usaha terkecil sampai unit usaha besar. Dengan adanya implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan Sosialisasi SVLK ini, diharapkan SVLK tidak hanya diketahui oleh jajaran pimpinan saja tetapi para pegawai di unit usaha bidang kehutanan baik laki-laki maupun perempuan juga mengerti dan memahami pentingnya SVLK ini diterapkan khususnya terkait dengan peredaran dan perdagangan hasil hutan.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara dan Pelaksanaan Pemilu 2024. Penjabaran RKP telah menentukan kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang dituangkan dalam Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.

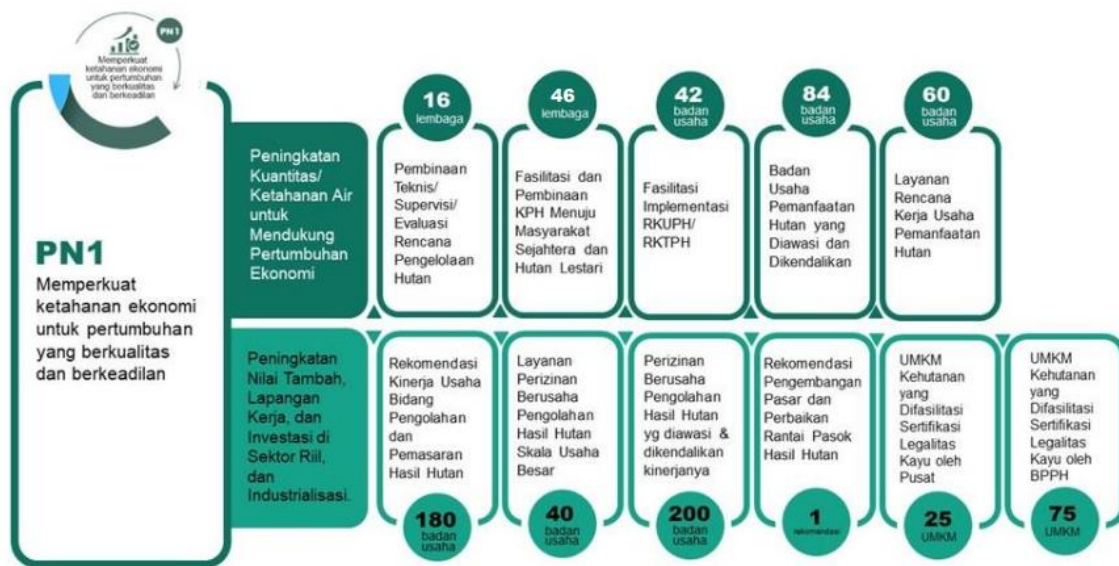


Gambar 27. Skema Prioritas Nasional RKP 2024

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, melalui 2 (dua) Program yaitu (1) Peningkatan Kualitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan (2) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Dalam Rencana

Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah dirinci secara lengkap Rincian Output sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dalam mendukung PN1.

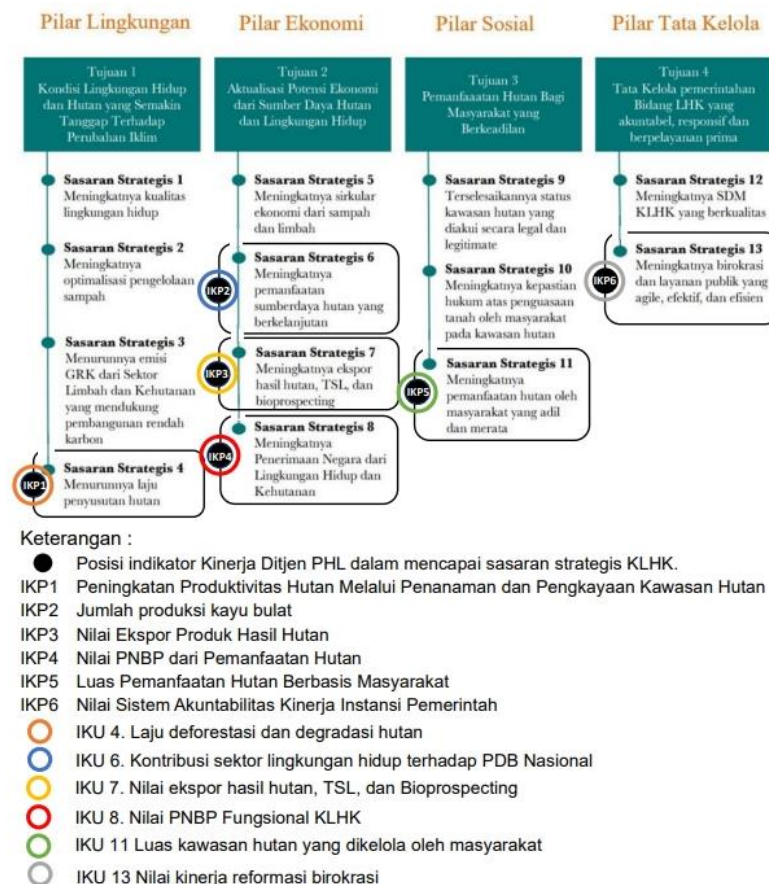
Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN1) “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan diversifikasi produksi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu.



Gambar 28. Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2024

Sejalan dengan strategi dalam mendukung PN1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Empat Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dengan menentukan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kerangka tujuan pembangunan LHK terbentuk dalam 4 (empat) pilar yaitu Pilar Lingkungan dengan tujuan kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; Pilar Ekonomi dengan tujuan aktualisasi potensi ekonomi dan Sumber Daya Hutan dan lingkungan hidup; Pilar Sosial dengan tujuan pemanfaatan hutan

bagi masyarakat yang berkeadilan dan Pilar Tata Kelola dengan tujuan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.



Gambar 29. Tujuan pembangunan LHK

Tujuan Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 sejalan pula dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs didukung melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada beberapa tujuan (*goals*) yaitu (1) *Goal 1* : Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk dimanapun; (2) *Goal 8* :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (3) *Goal 13* : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (melalui capaian *Net Zero Emission* pada Tahun 2030); (4) *Goal 17* : Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Ditjen PHL 2020-2024, maka Ditjen PHL menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut antara lain :

- Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan;
- Peningkatan produktivitas hutan antara lain : melalui pembinaan TPTI, *Reduced Impact Logging (RIL)*, Teknik Silvikultur Intensif/Multi Sistem Silvikultur, Multiusaha Kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan;
- Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan);
- Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan;
- Peningkatan daya saing industri seperti revitalisasi mesin dan diversifikasi produk industri kehutanan;
- Optimalisasi penerimaan PNBP dari *added value*;
- Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.

Adapun strategi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yaitu antara lain :

- Menjamin kepastian usaha
- Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan *Reduced Impact Logging (RIL)* pada hutan alam;
- Multibisnis/multiusaha kehutanan;
- Evaluasi kinerja PBPH;
- Optimalisasi pemanfaatan kawasan;
- Penyelesaian konflik melalui pemberian akses legal;
- Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air;
- Pengelolaan areal hutan pasca penanggulangan Karhutla;
- Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi;

- Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi, jasa lingkungan, wisata alam dan HHBK;
- Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK;
- Mendorong PBPH untuk membangun industri terintegrasi PBPHH;
- Optimalisasi limbah hasil hutan pasca pengolahan;
- Rasionalisasi kapasitas PBPHH melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan;
- Mendukung ketahanan energy dengan PBPHH pellet;
- Pengembangan HS *code* yang sesuai dengan tren pasar;
- Fasilitasi SVLK untuk usaha kehutanan kecil/UMKM;
- Efisiensi mesin/mendukung peremajaan mesin produksi.

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2024

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mendukung visi tersebut Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengampu 6 (enam) sasaran program yaitu :

1. Menurunnya laju penyusutan hutan
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2024

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2024
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Menurunnya laju penyusutan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	453.000 ha
		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	2. T2.S2.1.1.1. Jumlah Produksi Kayu Bulat	60 juta m ³
		Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	3. T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	10,5 miliar USD
		Meningkatnya PNPB dari LHK	4. T2.S4.1.1.1. Nilai PNPB dari Pemanfaatan Hutan	3,30 Triliun Rupiah
		Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	5. T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	15.000 ha
2	Dukungan Manajemen	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 poin

Sumber : Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2024.

Pencapaian kinerja Ditjen PHL dalam upaya pengelolaan hutan tidak lepas dari peran serta dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lintas kementerian/Lembaga, pihak swasta (unit manajemen), NGO Lembaga Donor, akademisi, sampai dengan masyarakat. Pada lingkup BPHL Wilayah XII juga terbentuk *crosscutting* berbagai pihak seperti Es. III lingkup KLHK, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Prova (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), pihak swasta, unit usaha kehutanan dan masyarakat. Gambaran *crosscutting* dalam lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 30. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL



Gambar 31. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL

Dalam rangka mencapai target kinerja Ditjen PHL dan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program pada Renstra 2020-2024 diperlukan penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas kegiatan Ditjen PHL Tahun 2024. Prioritas kegiatan Ditjen PHL Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dalam RPH (RPHJP & RPHJPD) dan RKPH (RKUPH & RKTTPH).
2. Penyelarasan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dengan RPHJP KPH.
3. Percepatan Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan dan Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hulu.

4. Implementasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan sesuai Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
5. Inisiasi Proses Bisnis Perizinan Pemanfaatan Hutan dalam Areal KHDPK sesuai RPH KHDPK.
6. Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hilir.
7. Kampanye Positif SVLK.

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan ***"Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen"*** dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan
2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII disajikan pada Tabel 10.

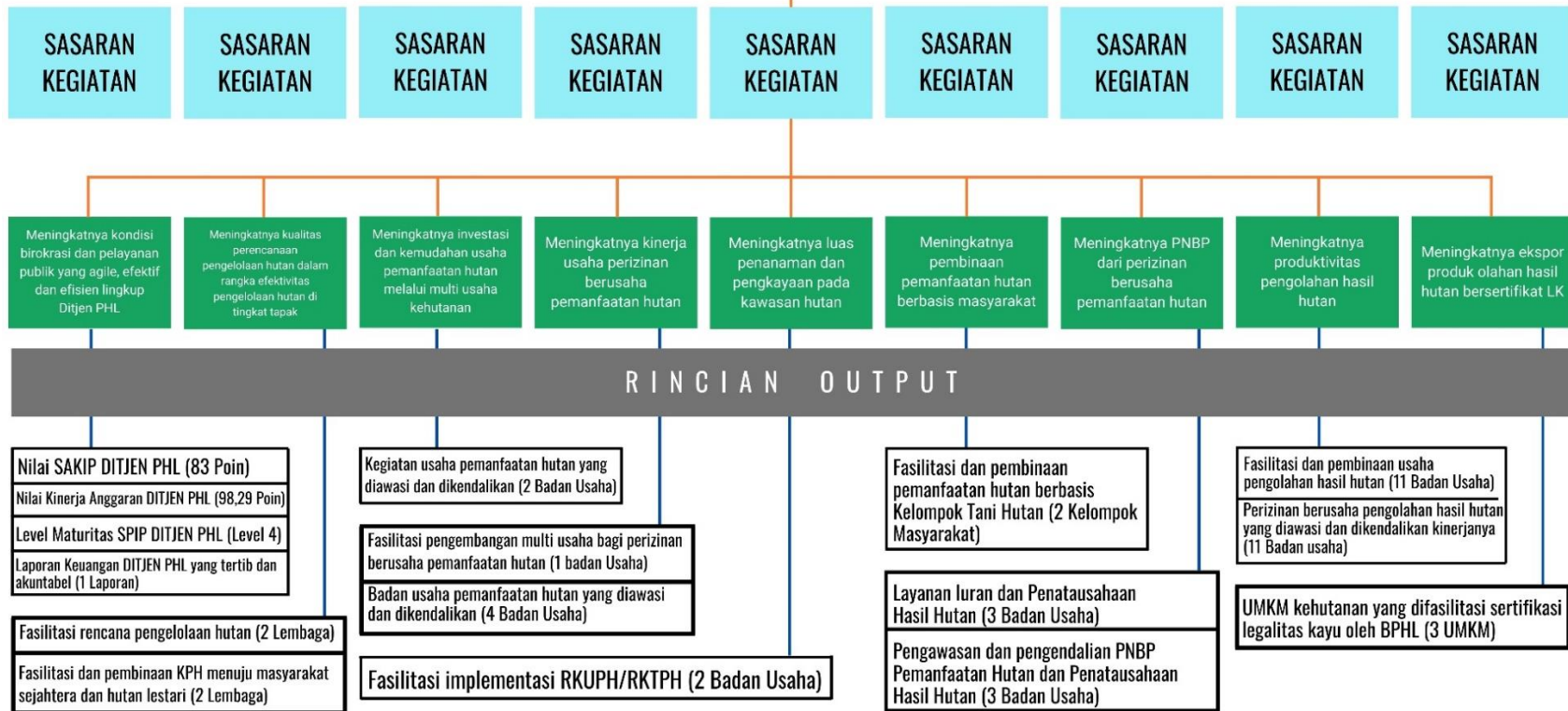
Tabel 10. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Perkantoran	83 Poin	8.233.244.000
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL	Layanan Umum	98,29 Poin	134.300.000
		T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Prasarana Internal	Level 4	2.800.000.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Layanan Sarana Internal	1 Laporan	69.817.000
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas oengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	2 Lembaga	881.636.000
		T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	331.695.000
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	531.555.000
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	215.545.000
		T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Badan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha	499.802.000
5	Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Fasilitasi implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha	257.142.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	122.165.000
7	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Layanan iuran dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	146.599.000
		T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	296.599.000
8	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha	390.933.000
			Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	11 Badan Usaha	537.533.000
9	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM	700.000.000

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN ANGGARAN 2024



Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-029-03.2.426964/2024 Tanggal 24 November 2023, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.148.565.000,- yang terdiri dari :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 13.668.863.000,-.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Rp. 2.479.702.000,-.

Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Keterangan
		Fisik	Keuangan	
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	1 Lembaga	706.040.000	
6729.BDB.001	Fasilitasi Penyusunan RPHJP/RPHJPD	2 Lembaga	881.636.000	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	331.695.000	Prioritas Nasional
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	2 Badan Usaha	531.555.000	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	531.555.000	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2 Kelompok Masyarakat	1.094.654.000	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	122.165.000	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	215.545.000	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha	257.142.000	Prioritas Nasional
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	499.802.000	Prioritas Nasional

6732	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	443.198.000	
6732.BDH.002	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	146.599.000	
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	296.599.000	
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha	1.628.466.000	
6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha	390.933.000	
6733.QDG.001	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu	3 UMKM	700.000.000	Prioritas Nasional
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	11 Badan Usaha	537.533.000	Prioritas Nasional
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen			
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	2 Layanan	7.956.418.000	
5396.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	134.300.000	
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.233.244.000	
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	36 Unit	2.869.817.000	
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	35 Unit	69.817.000	
5396.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	2.800.000.000	
Jumlah			11.237.361.000	

Sumber RKAKL BPHL Wilayah XIII Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan dan pencapaian rincian output kegiatan, BPHL Wilayah XIII Makassar melaksanakan upaya-upaya pencapaian melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan (1) Kegiatan Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPHJP/RPHPJd melalui Bimbingan teknis penyusunan RPHJP/RPHJPd melalui SI-RPHJP KPH; melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Tata Hutan KPH; dan beberapa kegiatan dukungan pelaksanaan pencegahan darkarhutla, dan (2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari melalui kegiatan Bimtek peningkatan SDM KPH dan anggota KTH; Fasilitasi dan pembinaan KPH Efektif, dan Kegiatan Bimtek Pengembangan Ekonomi Produktif pada KPH/KTH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH).

2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan (1) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bidang usaha pemanfaatan hutan, dan (2) Kegiatan Fasilitasi pertemuan forum bisnis (temu usaha) pagi para pelaku usaha dan stakeholder yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH).

3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan melalui kegiatan fasilitasi/pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH, dan (2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi PBPH melalui kegiatan FGD pengembangan multiusaha kehutanan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH, (3) Kegiatan fasilitasi implementasi RKUPH/RKTPH melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKTPH, kegiatan bedah kinerja PBPH, (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian badan usaha pemanfaatan hutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman/produksi hasil hutan/produksi multiusaha kehutanan, pengawasan dan pengendalian perlindungan hutan pada pemegang PBPH dan perizinan lainnya. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH).

4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan (1) Kegiatan Peningkatan Layanan Iuran dan PUHH melalui kegiatan fasilitasi/pembinaan tenaga profesional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH, dan (2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan PUHH melalui pemberian rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja tenaga profesional, penertiban pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH).

5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan (1) Kegiatan fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan legalitas hasil hutan, pembinaan teknis legalitas pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah, (2) Kegiatan Fasilitasi sertifikasi legalitas kayu melalui fasilitasi sertifikasi/penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM, inventarisasi dan verifikasi UMKM, pembekalan SDM pendamping pelaksanaan SVLK, dan sosialisasi SVLK; (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH melalui kegiatan pemantauan kinerja PBPHH, pemantauan harga pasar hasil hutan dan harga pasar produk olahan hasil hutan, dan kegiatan bedah kinerja PBPHH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan pemberian layanan berupa (1) Layanan umum seperti pelaksanaan kegiatan rencana program dan anggaran, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan penilaian SAKIP dan penilaian level maturitas SPIP, (2) Layanan Perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor, (3) Layanan sarana internal melalui pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan (4) layanan prasarana internal melalui renovasi gedung kantor. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Sekditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

C. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai salah satu konsep kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis BPHL Wilayah XIII Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif yang dapat mempercepat pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Memastikan pelaksanaan pengarusutamaan dalam percepatan pencapaian target yang telah direncanakan bertujuan agar akses pembangunan dapat dirasakan secara merata dan adil. Pengarusutamaan terdiri dari 4 (empat) unsur yang saling berkaitan satu sama lain, antara lain :

1) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Komitmen pemerintah dalam pembangunan hutan berkelanjutan merupakan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan generasi masa yang akan datang. Pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat mencakup dalam aspek kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Tahun 2024, BPHL Wilayah XIII terus berkomitmen mewujudkan keberlanjutan pembangunan dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha kehutanan hingga masyarakat pada tingkat tapak dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah dilaksanakan secara rasional dan sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang dijalankan. Tahun 2024, komitmen BPHL Wilayah XIII terus dilanjutkan dalam pengimplementasian PUG yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Implementasi pelaksanaan PUG dimulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga tahapan pemantauan dan evaluasi. Upaya ini diharapkan terus bertahan agar proses dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata baik untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Implementasi PUG dalam tahap perencanaan dan penganggaran lingkup BPHL Wilayah XIII terdapat pada kegiatan pada Tabel 12.

Tabel 12. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	Pagu (Rp.)
6729.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	331.695.000
6731.QIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001. Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi &Dikendalikan	2 Badan Usaha	499.802.000
6733.QDG. Fasilitas dan Pembinaan UMKM	001. UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat	3 UMKM	700.000.000

Sumber : Dokumen Anggaran Responsif Gender BPHL-XIII Tahun 2024.

3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Proses pembangunan sangat didukung oleh internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya. Implementasi pengarusutamaan modal sosial budaya yang dijaga dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan proses dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang memberikan penghargaan dan ruang tumbuh bagi budaya masyarakat sehingga nilai-nilai kebudayaan bangsa tetap terjaga dan lestari. Tahun 2024, BPHL Wilayah XIII berkomitmen mengimplemetasikan kegiatan yang telah direncanakan dengan tetap mendukung dan menghargai budaya masyarakat sebagai bentuk melestarikan dan memajukan kebudayaan bangsa.

4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Strategi penerapan teknologi dituangkan dalam bentuk perubahan penyajian data dan informasi. Perubahan bentuk penerapan teknologi dalam bentuk transformasi digital memudahkan akses dalam mendapatkan informasi serta memenuhi kewajiban khususnya dalam bidang PUHH. Ditjen PHL mengimplementasikan transformasi digital melalui pengelolaan sumber data informasi terpusat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI-PHL) yang terdiri dari :

- SI-RPHJP (Sistem Informasi – Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)
- OSS (Sistem Online Single Submission)
- SIPASHUT (Sistem Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan)
- SI-PUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)
- SI-PNBP (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak)

- SI-GANISHUT (Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan)
- SI-RPBBI (Sistem Informasi Rencan Penerimaan Bahan Baku Industri)
- SILK
(Sistem Informasi Legalitas Kayu)
- SATU DATA PHL

Tahun 2024, BPHL Wilayah XIII berkomitmen mendukung transformasi digital dalam bentuk penyajian data dan informasi pada sajian sistem informasi, menyiapkan sumber daya pendukung dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Lestari. Rencana Kerja ini bertujuan agar tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik serta mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan identifikasi rencana yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian kinerja Balai Pemantauan Hutan Lestari Wilayah XIII dalam Tahun 2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII diharapkan dapat memberikan hasil yang mendukung prioritas pembangunan pemerintah, mendukung pengelolaan hutan secara baik dan bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan produktifitas hutan dan daya saing industri untuk kesejahteraan masyarakat.